

# Tiga Agenda Utama Paripurna, APBD-P Tahun 2022 Jadi Rp3 Triliun

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-21 Masa Sidang III Tahun 2022 dengan tiga agenda utama yakni Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Balikpapan tentang Perubahan APBD TA 2022.

“Tadi rapat Paripurna bersama antara DPRD dan Wali Kota Balikpapan kita telah bersepakat, maka dalam waktu 7 hari kerja harus segera dikirim ke Gubernur untuk dievaluasi nanti hasilnya apa dirapatkan kembali dengan DPRD dan Pemkot dan Tim Banggar kalau ada yang dievaluasi,” ujar Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, Senin (12/9/2022)

Abdulloh menambahkan, namun dalam pelaksanaannya jika tidak ada evaluasi, maka akan langsung disahkan melalui paripurna sebagai APBD Perubahan 2022 agar bisa dilaksanakan OPD terkait.

Kemudian ada paripurna tata tertib DPRD dari hasil perubahan pansus sudah selesai dan ditetapkan menjadi Peraturan Tata Tertib DPRD Balikpapan untuk tahun 2022 dengan perubahan perubahannya.

“Sebelum disahkan tatib ini kami menggunakan tata tertib yang lama,” paparnya.

Selanjutnya ada Paripurna penetapan tata cara beracara dari Badan Kehormatan, sekarang sudah punya dasar untuk beracara seperti sidang diatur oleh tata tertib beracara di Badan Kehormatan itu sendiri.

“Sehingga Badan Kehormatan sudah mengatur dirinya sendiri, kalau kemarin belum memproses apapun manakalah ada permasalahan permasalahan internal untuk anggota DPRD Balikpapan,” ungkapnya.

Adapun besaran anggaran total APBD Perubahan 2022 menjadi Rp 3 Triliun itu sudah termasuk pendapatan, pengeluaran belanja modal, belanja langsung dan tidak langsung yang dulunya Rp 2,5 triliun.

“Besaran kenaikan bersumber dari dana salur yang sempat tidak disalurkan akibat covid-19 pada 2021 dan 2022, setelah 2022 laporan dana salur baik di provinsi dan pusat digelontorkan semua, termasuk dana alokasi khusus yang disalurkan ke daerah meningkat bukan dari pendapatan daerah,” tukasnya.